

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah)

Hardi Yuliandi*

Prof.Dr.H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S.,CN**

Adil Akhyar, S.H., LL.M. Ph.D***

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memperoleh sertifikat tanah. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana prosedur pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri di Kabupaten Aceh Tengah, bagaimana kepastian hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri di Kabupaten Aceh Tengah, bagaimana penyelesaian problematika/sengketa pertanahan dalam PTSL berdasarkan surat keputusan 3 Menteri di Kabupaten Aceh Tengah. Kepastian hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri adalah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dalam bentuk pemberian sertifikat hak atas tanah dan menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar dengan mudah untuk memperoleh data, baik data fisik dan data yuridis yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif dan pendekatan yang dipergunakan adalah yang penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan wawancara serta dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah apabila ada kesalahan data baik data fisik maupun data yuridis pada saat pengumuman data di desa/kelurahan dapat diperbaiki kembali sebelum dibuatkan sertifikat, tetapi apabila sertifikat telah terbit tetapi didalamnya ada kesalahan data, maka data yang salah dapat diajukan keberatan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional dan dapat diselesaikan melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi, yakni melalui mediasi atau dengan cara Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Pembiayaan, PTSL.

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

***Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRACT

COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION JURIDICAL ANALYSIS (PTSL) BASED ON JOINT DECREE OF 3 MINISTERS FROM THE PERSPECTIVE OF STATE ADMINISTRATIVE LAW (Central Aceh District Land Office Study)

Hardi Yuliandi*

Prof.Dr.H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S.,CN**

Adil Akhyar, S.H., LL.M. Ph.D**

Complete Systematic Land Registration (PTSL) is one of the programs organized by the Government to assist the community in obtaining land certificates. The problem formulation for this research is how the financing procedure for Complete Systematic Land Registration (PTSL) is based on the Joint Decree of 3 Ministers, what is the legal certainty of Complete Systematic Land Registration (PTSL) based on the Joint Decree of 3 Ministers, how is the resolution of land problems/disputes in PTSL based on the decree? 3 Ministers. The legal certainty of Complete Systematic Land Registration (PTSL) based on the Joint Decree of 3 Ministers is to provide legal protection to holders of rights to a plot of land in the form of granting land rights certificates and providing information to interested parties so that it is easy to obtain data, both physical data and juridical data that have been registered are open to the public and orderly administration is maintained, both in terms of transfer, encumbrance and deletion of rights to land parcels.

This research method is descriptive and the approach used is empirical juridical research aimed at analyzing problems by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The data collection tools were document studies and interviews and analyzed qualitatively.

The conclusion of this research is that dispute resolution in complete systematic land registration is that if there are data errors, both physical data and juridical data, at the time of data announcement in the village/kelurahan, it can be corrected again before a certificate is made, but if the certificate has been issued but there are data errors in it, then Incorrect data can be objected to at the National Land Agency Office and can be resolved through litigation or non-litigation, namely through mediation or by means of the State Administrative Court.

Keywords: Land Registration, Financing, PTSL.

**Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

****Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*